

UNTUK SKEMA SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI (*FINANCE LEASE*)

DALAM SUATU PROSES KEPAILITAN

Robertus Manurung,¹ Irna Nurhayati²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sifat piutang kreditur perusahaan pembiayaan untuk sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) dalam suatu proses kepailitan ketika nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan (*Lessee*) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan bagi Kurator atau Hakim Pengawas dalam menentukan sifat piutang kreditur perusahaan pembiayaan untuk skema sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*).

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan empiris yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan dengan mewawancarai beberapa Kurator dan membandingkan penentuan sifat piutang yang ditetapkan oleh Kurator dalam perkara kepailitan/PKPU yang melibatkan perusahaan pembiayaan sebagai salah satu krediturnya.

Berdasarkan analisis data dan wawancara yang dilakukan, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak kepemilikan perusahaan pembiayaan atas barang modal untuk skema *Finance Lease* memberikan penegasan mengenai kedudukan diutamakan perusahaan pembiayaan untuk melakukan segala hak yang diperoleh dari konsep hak milik, yaitu menarik, menjualnya serta mengambil sendiri hasil dari penjualan barang modal tersebut untuk digunakan dengan cara mendahulukan dalam hal pembayaran. Apabila diperkirakan hasil penjualan atas barang modal tersebut tidak dapat menutupi seluruh utangnya, maka kreditur perusahaan pembiayaan dapat memintakan agar terhadap kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai kreditur konkuren. Selanjutnya penggunaan hak opsi dapat membuka ruang dan kesempatan bagi Kurator untuk memasukkan barang modal ke dalam harta pailit yaitu dengan membayar lunas kewajiban *Lessee*/debitur pailit. Dasar pertimbangan bagi Kurator dan Hakim Pengawas dalam menentukan sifat piutang ini yaitu dengan memperhatikan konsep kepemilikan barang modal dan ketentuan dalam Pasal 1131 KUH Perdata, Pasal 1 angka 1, Pasal 21, Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-undang Kepailitan.

Kata Kunci : Kreditur, Perusahaan Pembiayaan, *Finance Lease*, Kepailitan

¹ Mahasiswa Konsentrasi hukum Bisnis, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

² Dosen Pembimbing, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

ANALYSIS OF THE NATURE RECEIVABLE OF FINANCE COMPANY FOR FINANCE LEASE SCHEME IN A BANKRUPTCY PROCESS

Robertus Manurung,¹ Irna Nurhayati²

ABSTRACT

This research is intended to obtain a comprehension how to determine receivables Finance Lease of creditor finance company in a bankruptcy process when the party who receives financing facility (Lessee) is declared bankrupt by the Commercial Court. In addition, in this research also has purpose to capture the basic consideration for the Receiver and Supervisory Judge in determining the nature of receivables for Finance Lease Scheme of creditor finance company.

This research is normative and empirical juridical research which means is research which refers to the legal norms in laws and regulations which connected to the reality in the field by interviewing several Receiver and then to be analyzed by comparing with stipulation issued by Receiver in bankruptcy/suspension of payment case which involving finance company as one of creditor in a bankruptcy.

Based on data analysis and interviews, the research shows that the ownership right of Lease Item in the Finance Lease scheme gives confirmation of the preferred position of the finance company to exercise any right which obtained from the concept of ownership right, which is, to conduct repossession, sell it and take the sale proceeds of lease item to be used by prioritizing in terms of payment. If the estimated of the sale proceeds are unable to cover all its debts, the creditors of the finance company may require that the deficit be counted as a unsecured creditor. Furthermore the exercise of the option right may open the opportunity for the Receiver to include the lease item into the bankrupt assets by settlement off all Lessee's obligations/bankrupt debtor. The basic of consideration for the Receiver and Supervisory Judge to determine the nature of the finance company's creditors receivables for Finance Lease in a bankruptcy process by considering the concept of ownership right of lease item and provisions of Article 1131 Indonesian Civil Code, Article 1 point 1, Article 21, Article 36 and Article 38 Bankruptcy Law.

Keywords: Creditor, Finance Company, Finance Lease, Bankruptcy

¹ Student at Master of Law Studies Program, Concentration in Business Law, Law Faculty University of Gadjah Mada.

² Lecturer, Master of Law Studies Program, Law Faculty University of Gadjah Mada.